

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum

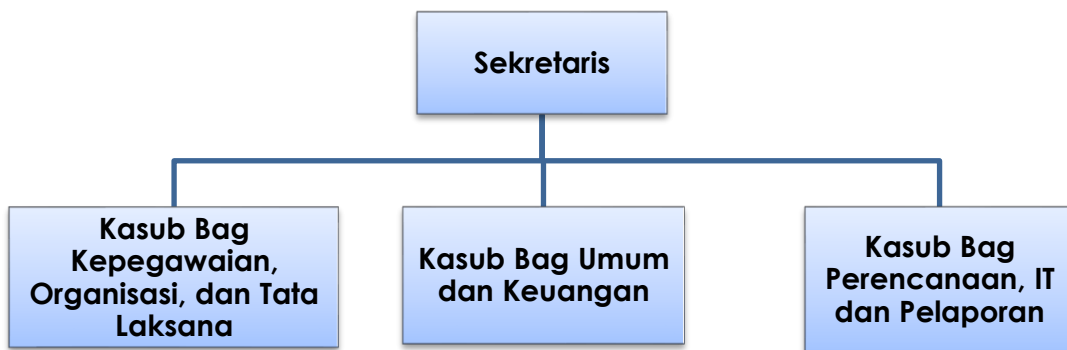
BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprasi di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



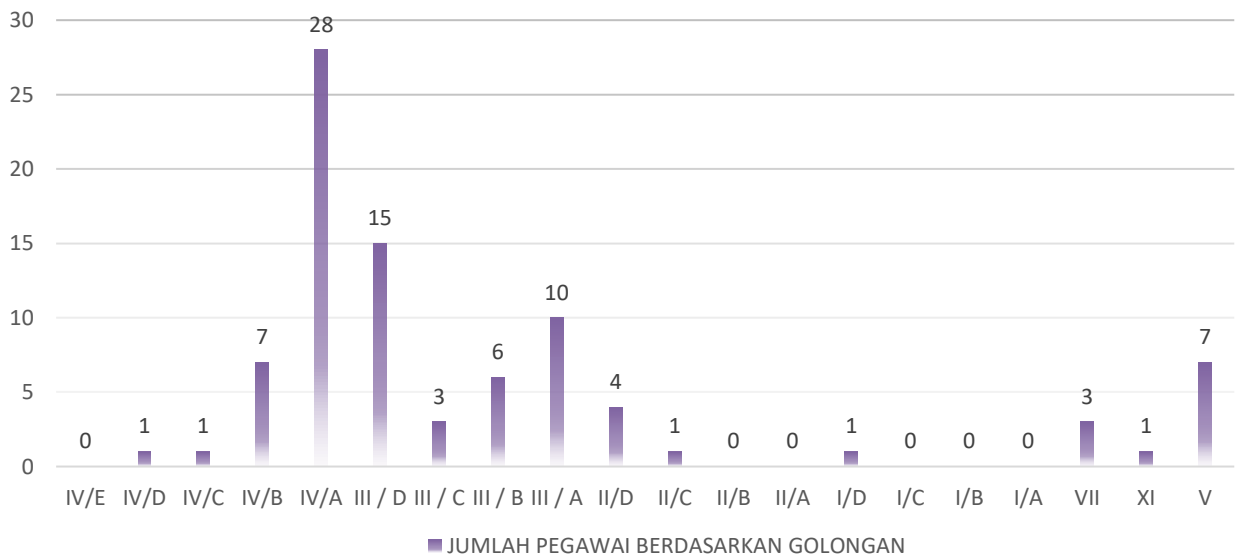
- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Seluruh Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Januari 2026 adalah 73 orang PNS, 4 orang CPNS, 11 orang PPPK, yang terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 59 Orang dan Perempuan 29 Orang, adapun rincian sebagai berikut :

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	DARMA SETIA BUDIANSO PURBA, S.H., M.H.	HAKIM PTUN MEDAN	HAKIM PTUN JAKARTA	TMT 20 JANUARI 2026
2.	LUTFI, S.H.	HAKIM PTUN MAKASSAR	HAKIM PTUN JAKARTA	TMT 19 JANUARI 2026

Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN

DATA HAKIM / PEGAWAI BARU:

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

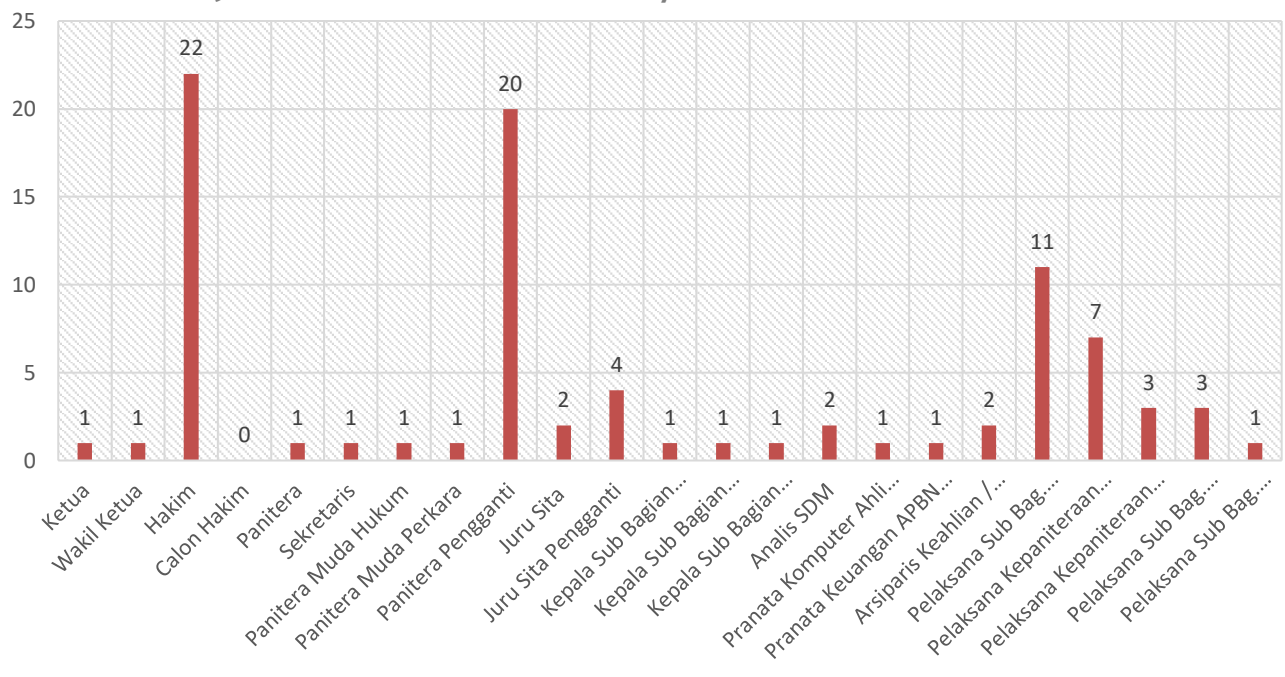
NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	KET
1.	DARMA SETIA BUDIANSO PURBA, S.H., MH	HAKIM PTUN JAKARTA		TMT 20 JANUARI 2026
2.	LUTFI, S.H	HAKIM PTUN JAKARTA		TMT 19 JANUARI 2026

PELANTIKAN / PENGANGKATAN JABATAN BARU

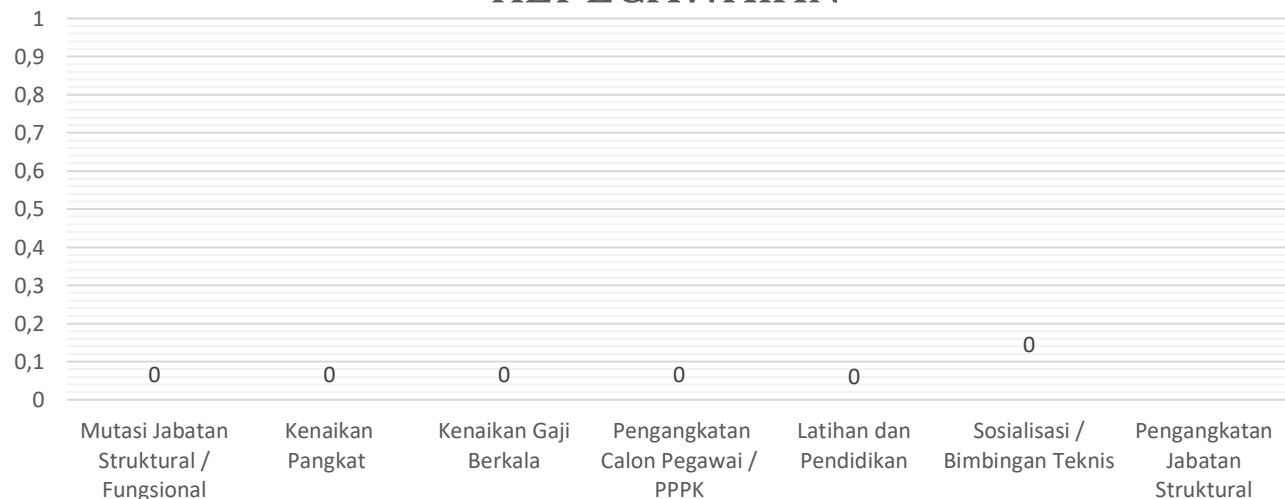
NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Masuk

No.	SUB. BAGIAN	SURAT MASUK			JUMLAH	
		DARI	BIASA	PENTING		RAHASIA
1	PERSURATAN	MAHKAMAH AGUNG RI	5	-	3	5
2		PTUN Jakarta	3	-	-	3
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	-	-	-	-
4		DIRJEND. BADIMIL TUN	9	-	-	9
5		KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-
6		PERKARA / LAIN-LAIN	128	-	-	128
7		UMUM / LAIN-LAIN	46	-	-	46
TOTAL					191	

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			UMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub.Bag.Kepegawaian dan Ortala	269	0	0	269
2	Sub.Bag.Umum dan Keuangan	40	0	0	40
3	Sub.Perencanaan, TI,dan Pelaporan	5	0	0	5
4	Kepaniteraan Muda Perkara	152	0	0	152
5	Kepaniteraan Muda hukum	20	0	0	20
6	Lain-lain	0	0	0	0
TOTAL					486

2) Tata Kearsipan :

Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

3) Inventaris dan Persediaan :

Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.

Untuk bulan Januari Tahun 2026 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

No	Nama Barang	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Jumlah
1	A.C. Split	4		28	32
2	Acces Point	5			5
3	Air Conditioning (AC)	18			18
4	Amplifier			3	3
5	Asbak Tinggi			1	1
6	Audio Mixing Console	1			1
7	Bangku Panjang Besi/Metal	7		17	24
8	Bracket Standing Peralatan	8			8
9	Brandkas			1	1
10	Buffet			1	1
11	Buku Lainnya	18			18
12	Camera Conference	1			1
13	Camera Digital	2			2
14	CCTV - Camera Control Television System	26			26
15	Digital LED Running Text	1			1
16	Dispenser	7			7
17	Facsimile	2			2
18	Filing Cabinet Besi	41		1	42
19	Filling Sealing	73			73
20	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	4			4
21	Gedung Pos Jaga Permanen	1			1
22	Genset	1			1
23	Jam Mekanis			6	6
24	Kipas Angin		3		3
25	Komponen/Alat Pengolah Data	26			26
26	Komputer Jaringan Lainnya	29			29
27	Kursi Besi/Metal	606		1	607
28	Kursi Kayu	55		14	69
29	Lambang Garuda Pancasila	6			6
30	Lambang Instansi	7			7
31	Lap Top	9			9
32	Layar Film/Projector	1			1
33	LCD Monitor	1			1
34	LCD Projector/Infocus	1			1
35	Lemari Besi/Metal	17	8	7	32
36	Lemari Kayu	2		22	24
37	Lemari Penyimpan	35			35
38	Loudspeaker	4		5	9
39	Meja Kerja Kayu	173		28	201
40	Meja Komputer			3	3
41	Meja Makan Besi	5			5
42	Meja Rapat	39			39
43	Meja Resepsionis	1		1	2
44	Mesin Absensi	1			1

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

45	Mesin Antrian	2			2
46	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1
47	Microphone	13			13
48	Microphone/Wireless MIC	1			1
49	Mimbar/Podium	1			1
50	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1			1
51	Mixer	3			3
52	Mixer Sound Sistem	1			1
53	Modem	1			1
54	Monografi	2			2
55	Movitex Board	1			1
56	Note Book	23			23
57	P.C Unit	42			42
58	Palu Sidang	1		5	6
59	Panggung	2			2
60	Papan Gambar	1			1
61	Papan Pengumuman	6			6
62	Peralatan Komputer Lainnya	2			2
63	Perkakas Kantor Lainnya	10			10
64	Pesawat Telephone	18		24	42
65	Piagam	3			3
66	Piala	12			12
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29		10	39
68	Public Address Branch Exchange (PABX)	1			1
69	Rak Besi	134		22	156
70	Rak Server	1			1
71	Router	5			5
72	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen		2		2
73	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		2	2	4
74	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8			8
75	Sedan	2		1	3
76	Sepeda Motor	7	1		8
77	Server	3			3
78	Sofa	27			27
79	Software Komputer		4		4
80	Sound System	1			1
81	Stempel Timbul/Bulat	1			1
82	Tabung Pemadam Api	9			9
83	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1			1
84	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4			4
85	Tangga Aluminium	1			1
86	Telepon Digital	4			4
87	Televisi			1	1
88	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1		1	2
89	Wireless	1			1
90	Workstation	1			1
	Total	1626	20	205	1851

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Note : Tabung Pemadam Api berjumlah 24 Tabung, 12 tabung expired 2027, 12 tabung expired Agustus 2025. baru terdaftar di siman 9 tabung.

Sedang berkoordinasi dengan biro perlengkapan terkait penangannya.

4) Perpustakaan :

Untuk Bulan Januari 2026 Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

b. Keuangan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Januari 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	20,783,935,000	0	0	4,780,025,730	4,780,025,730	23.00 %	16,003,909,270
WA Program Dukungan Manajemen	20,783,935,000	0	0	4,780,025,730	4,780,025,730	23.00 %	16,003,909,270
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
EBB.901 Layanan Sarana Internal	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
053.0A Pengadaan Meubelair	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
WA.0986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	20,783,935,000	0	0	4,780,025,730	4,780,025,730	23.02 %	15,983,909,270
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	20,783,935,000	0	0	4,780,025,730	4,780,025,730	23.02 %	15,983,909,270
EBA.902 Layanan Umum	1,440,000	0	0	0	0	0.00 %	1,440,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,440,000	0	0	0	0	0.00 %	1,440,000
005.0A Layanan Sarana Dan Prasarana Internal Ekstrakomptabel	1,440,000	0	0	0	0	0.00 %	1,440,000
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0	0	0	0	0.00 %	1,440,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	20,782,195,000	0	0	4,780,025,730	4,780,025,730	23.02 %	15,982,169,270
001 Gaji dan Tunjangan	15,725,151,000	0	0	3,322,465,003	3,322,465,003	21.13 %	12,402,685,997
001.0A GAJI DAN TUNJANGAN	15,725,151,000	0	0	3,322,465,003	3,322,465,003	21.13 %	12,402,685,997
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	747,423,000	0	0	627,099,900	627,099,900	83.90 %	120,323,100
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	60,000	0	0	7,353	7,353	12.26 %	52,647
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	367,458,000	0	0	48,493,506	48,493,506	13.20 %	318,964,494
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	118,370,000	0	0	16,280,260	16,280,260	13.75 %	102,089,740
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	43,200,000	0	0	5,760,000	5,760,000	13.33 %	37,440,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	190,337,000	0	0	26,475,000	26,475,000	13.91 %	163,862,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	140,000,000	0	0	185,670	185,670	0.13 %	139,814,330
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	257,525,000	0	0	33,530,460	33,530,460	13.02 %	223,994,540
511129 Belanja Uang Makan PNS	889,741,000	0	0	52,265,000	52,265,000	5.87 %	837,476,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Januari 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	73,654,000	0	0	5,885,000	5,885,000	7.99 %	67,769,000
511324 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1,795,717,000	0	0	408,161,610	408,161,610	22.73 %	1,387,555,390
511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	10,947,545,000	0	0	2,021,600,000	2,021,600,000	18.47 %	8,925,945,000
511011 Belanja Gaji Pokok PPPK	39,000,000	0	0	58,901,000	58,901,000	148.74 %	-19,301,000
511019 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	0	0	1,840	1,840	26.29 %	5,160
511021 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,704,000	0	0	2,719,380	2,719,380	73.42 %	984,620
511022 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,456,000	0	0	630,544	630,544	43.31 %	825,456
511024 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	0	0	700,000	700,000	14.29 %	4,200,000
511025 Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,044,000	0	0	3,186,480	3,186,480	78.80 %	857,520
511028 Belanja Uang Makan PPPK	100,400,000	0	0	6,972,000	6,972,000	6.94 %	93,428,000
511033 Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,000	0	0	3,610,000	3,610,000	36,100.00 %	-3,600,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5,037,044,000	0	0	1,457,560,727	1,457,560,727	28.94 %	3,579,483,273
002.0A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	1,473,862,000	0	0	1,379,697,700	1,379,697,700	93.61 %	94,164,300
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,393,862,000	0	0	1,375,479,700	1,375,479,700	98.68 %	18,382,300
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	80,000,000	0	0	4,218,000	4,218,000	5.27 %	75,782,000
002.0B LANGGANAN DAYA JASA	939,491,000	0	0	72,365,568	72,365,568	7.70 %	867,125,432
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	194,000,000	0	0	326,203	326,203	0.17 %	193,673,737
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,200,000	0	0	0	0	0.00 %	4,200,000
522111 Belanja Langganan Listrik	706,291,000	0	0	72,039,305	72,039,305	10.20 %	634,251,695
522112 Belanja Langganan Telepon	6,000,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000,000
522113 Belanja Langganan Air	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
522141 Belanja Sewa	26,000,000	0	0	0	0	0.00 %	26,000,000
002.0C Pemeliharaan Kantor	1,393,251,000	0	0	4,747,459	4,747,459	0.34 %	1,388,503,541
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,000,294,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,294,000
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	42,750,000	0	0	0	0	0.00 %	42,750,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	350,207,000	0	0	4,747,459	4,747,459	1.36 %	345,459,541
002.0D Operasional Lainnya	203,310,000	0	0	0	0	0.00 %	203,310,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Januari 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	123,750,000	0	0	0	0	0 0.00 %	123,750,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79,500,000	0	0	0	0	0 0.00 %	79,500,000
002.0E HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM	995,280,000	0	0	0	0	0 0.00 %	995,280,000
522141 Belanja Sewa	995,280,000	0	0	0	0	0 0.00 %	995,280,000
002.0G Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding	31,850,000	0	0	750,000	750,000	2.35 %	31,100,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,100,000	0	0	0	0	0 0.00 %	25,100,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,750,000	0	0	750,000	750,000	11.11 %	6,000,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000
EBD.225 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000
005.0A Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000
521211 Belanja Bahan	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Januari 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	70.602,000	0	0	0	0	0 0.00 %	70.602,000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	70.602,000	0	0	0	0	0 0.00 %	70.602,000
BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	70.602,000	0	0	0	0	0 0.00 %	70.602,000
AEA Koordinasi	19.500,000	0	0	0	0	0 0.00 %	19.500,000
AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	19.500,000	0	0	0	0	0 0.00 %	19.500,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	19.500,000	0	0	0	0	0 0.00 %	19.500,000
005.0A Pelaksanaan Pengamanan Sidang	19.500,000	0	0	0	0	0 0.00 %	19.500,000
521211 Belanja Bahan	19.500,000	0	0	0	0	0 0.00 %	19.500,000
BCA Perkara Hukum Perseorangan	196,000	0	0	0	0	0 0.00 %	196,000
BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	196,000	0	0	0	0	0 0.00 %	196,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	196,000	0	0	0	0	0 0.00 %	196,000
005.0A Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	196,000	0	0	0	0	0 0.00 %	196,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000	0	0	0	0	0 0.00 %	18,000
521211 Belanja Bahan	178,000	0	0	0	0	0 0.00 %	178,000
OBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33.216,000	0	0	0	0	0 0.00 %	33.216,000
OBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33.216,000	0	0	0	0	0 0.00 %	33.216,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	33.216,000	0	0	0	0	0 0.00 %	33.216,000
005.0A Pos Bantuan Hukum	33.216,000	0	0	0	0	0 0.00 %	33.216,000
521211 Belanja Bahan	4.416,000	0	0	0	0	0 0.00 %	4.416,000
522131 Belanja Jasa Konsultan	28.800,000	0	0	0	0	0 0.00 %	28.800,000
OCA Perkara Hukum Perseorangan	17.690,000	0	0	0	0	0 0.00 %	17.690,000
OCA.002 Perkara yang ditayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	17.690,000	0	0	0	0	0 0.00 %	17.690,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	17.690,000	0	0	0	0	0 0.00 %	17.690,000
005.0A Sidang di luar Gedung Pengadilan	17.690,000	0	0	0	0	0 0.00 %	17.690,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.390,000	0	0	0	0	0 0.00 %	17.390,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan Januari 2026 agenda rapat meliputi :

1. Dalam arahnya, Ketua PTUN Jakarta menegaskan kembali pentingnya pelaksanaan tugas secara profesional, berintegritas, dan beretika, dengan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Kode Etik Kepaniteraan, serta Kode Etik ASN.
2. Ketua PTUN Jakarta juga menguraikan kembali substansi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016, serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, sebagai pedoman utama dalam penegakan disiplin, pengawasan atasan langsung, dan penanganan pengaduan (whistleblowing system).
3. Selain itu, seluruh ASN diingatkan untuk senantiasa mematuhi ketentuan disiplin pegawai sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021, PP Nomor 11 Tahun 2017, dan Peraturan

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. Ketua menekankan bahwa kedisiplinan dan kinerja maksimal akan berdampak positif terhadap karier individu serta menjaga citra dan penilaian satuan kerja.

4. Wakil Ketua PTUN Jakarta dalam penyampaian mengingatkan para Hakim agar penyelesaian perkara dilakukan sesuai ketentuan, yakni tidak melebihi jangka waktu lima bulan, dan apabila terdapat kendala wajib disertai surat keterangan.
5. Selain itu, Wakil Ketua menyoroti masih adanya kendala dalam pelaksanaan persidangan, khususnya terkait kesiapan sarana dan prasarana, petugas pengambil sumpah, serta koordinasi teknis persidangan. Untuk itu, Panitera diimbau agar melakukan briefing kepada jajaran kepaniteraan dan mengoptimalkan peran petugas terkait guna memastikan persidangan berjalan lancar.
6. Panitera PTUN Jakarta menegaskan kembali kepada seluruh jajaran kepaniteraan agar melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku, serta menghindari pelanggaran disiplin. Disampaikan pula bahwa e-register telah diterapkan sesuai dengan sosialisasi, sementara aplikasi e-keuangan masih menghadapi beberapa kendala teknis.
7. Panitera juga menginstruksikan kepada seluruh pengguna SIPP agar mengisi data secara lengkap dan benar, serta menyampaikan bahwa tindak lanjut Hawasbid telah dilaksanakan. Selain itu, Panitera mengapresiasi respons cepat Sekretaris dan jajarannya dalam menindaklanjuti kebutuhan sarana dan prasarana kepaniteraan
8. Sementara itu, Sekretaris PTUN Jakarta menyampaikan informasi terkait pagu anggaran satuan kerja tahun 2026 yang berjumlah sekitar Rp20 miliar, dengan komponen terbesar untuk gaji Hakim. Disampaikan pula bahwa rapelan tunjangan jabatan Hakim direncanakan akan diterima pada bulan Februari. Selain itu, Sekretaris menyampaikan peremajaan sound system serta mekanisme pengajuan kebutuhan ATK untuk semester berjalan.
9. Dalam rapat tersebut, Ketua PTUN Jakarta juga menyampaikan bahwa pada awal Februari 2026 akan dilaksanakan beberapa kegiatan berskala nasional, antara lain Kampung Hukum, Laporan Tahunan Mahkamah Agung, dan Hari

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

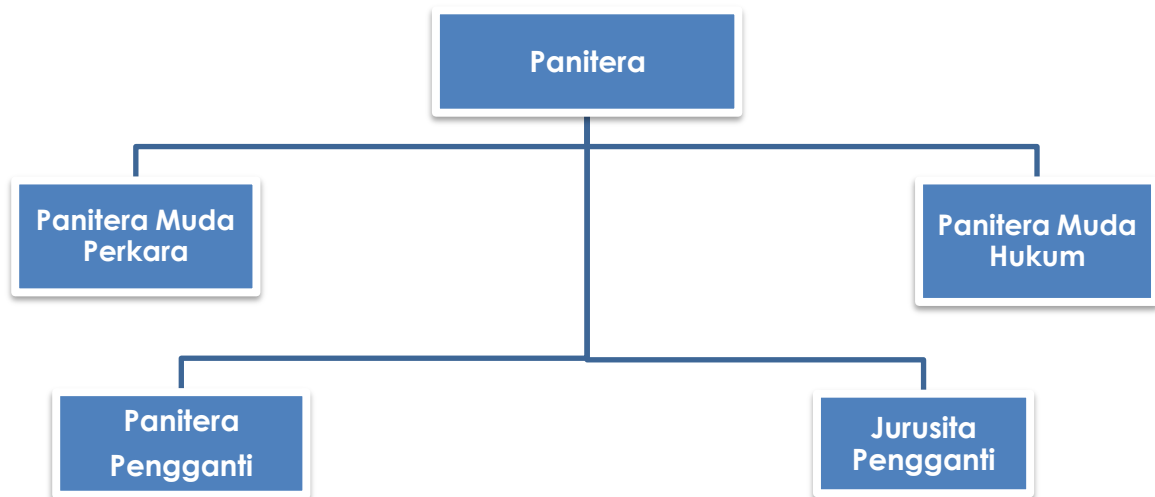
Ulang Tahun Peratun. Panitia pelaksana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

10. Seluruh aparatur yang ditunjuk sebagai panitia diharapkan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan komitmen demi menyukseskan kegiatan tersebut serta menjaga nama baik PTUN Jakarta.
 11. Sebelum menutup rapat, Ketua PTUN Jakarta kembali mengingatkan seluruh peserta rapat untuk bekerja dengan penuh semangat, berintegritas, saling bersinergi, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 12. Rapat Bulanan PTUN Jakarta bulan Januari 2026 ini menjadi sarana evaluasi, pembinaan, dan penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan peradilan yang profesional, berintegritas, dan terpercaya.
- b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.

B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

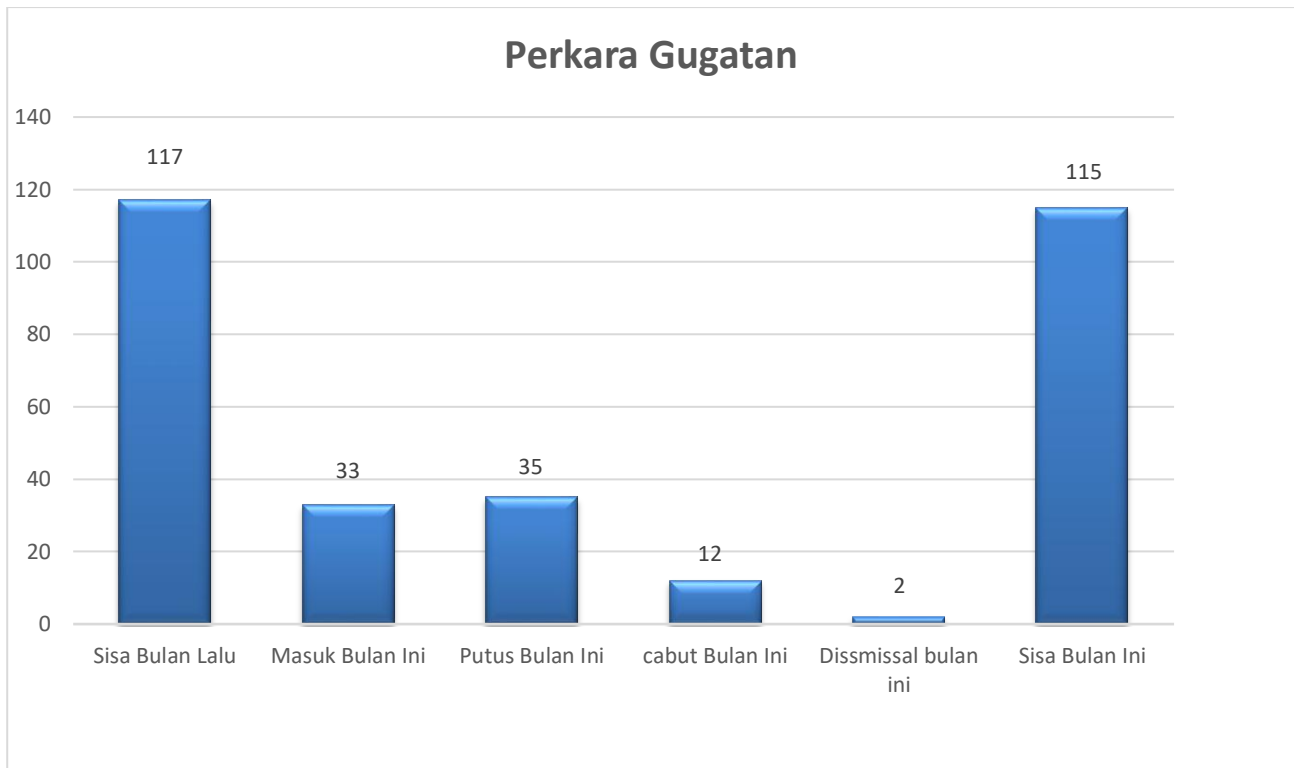
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Membuat jurnal keuangan perkara.
- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2025.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2026

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

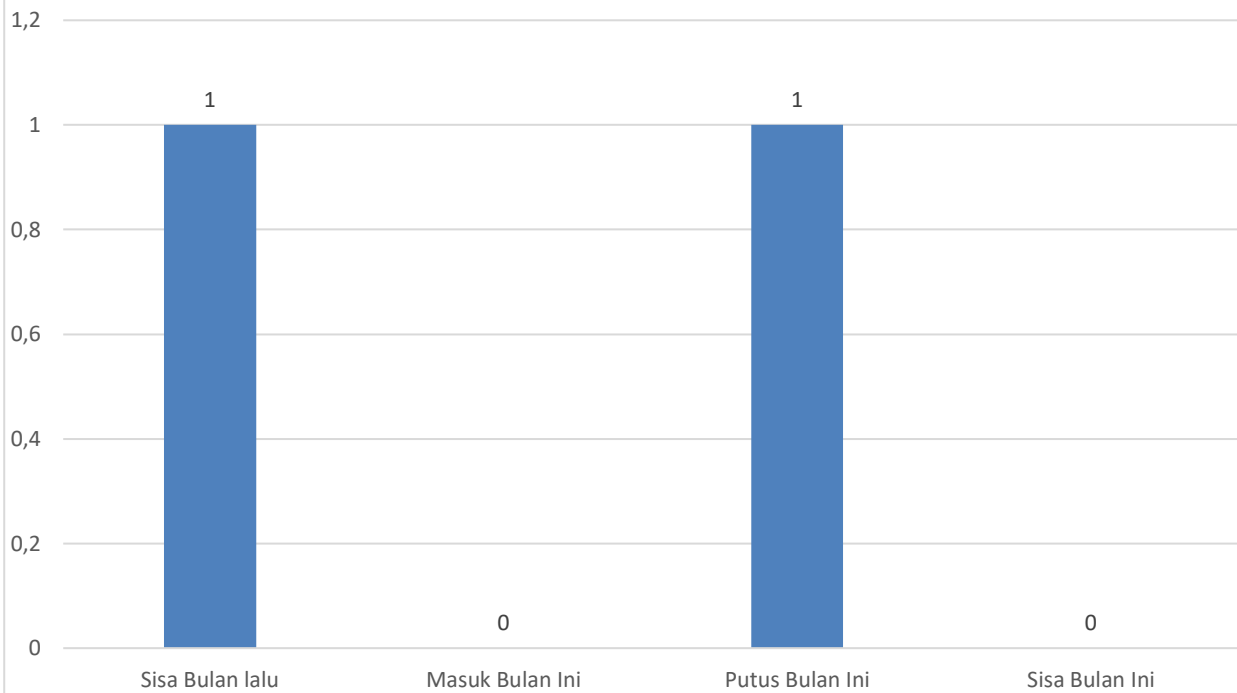
Keadaan Perkara



Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)
 $12 + 2 + 21 = 35$ Perkara

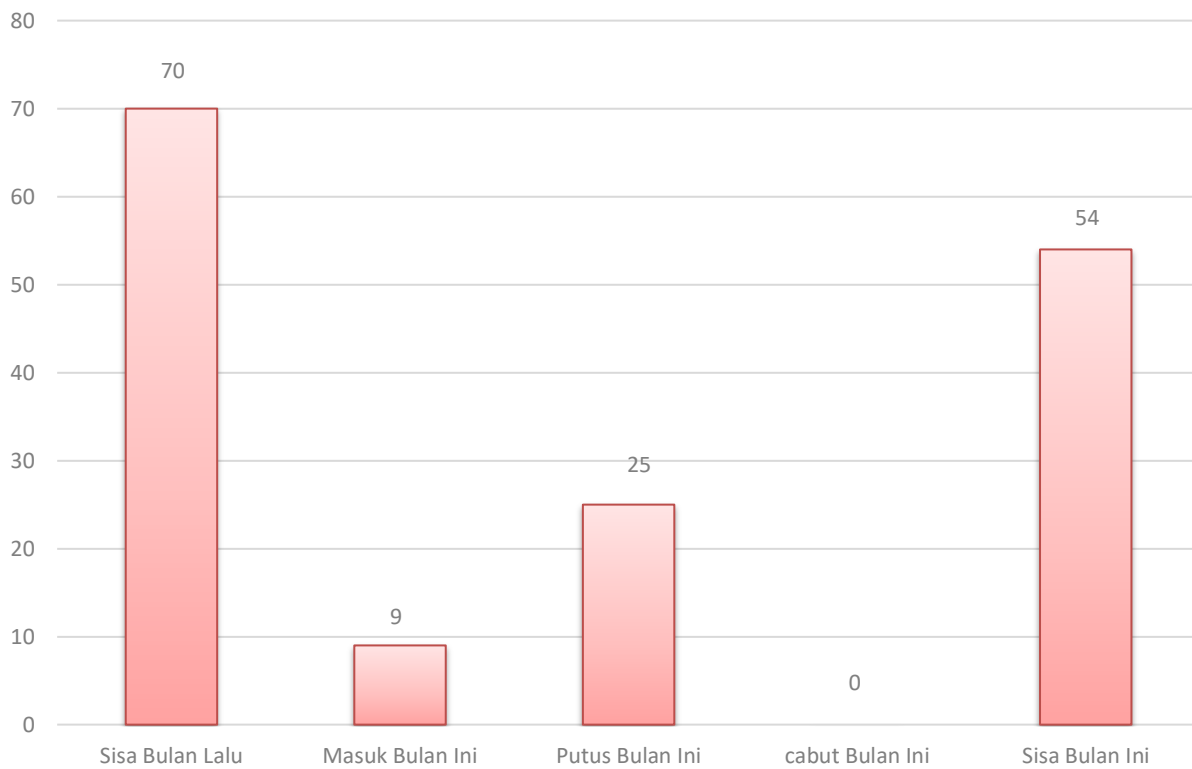
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Perlawanan

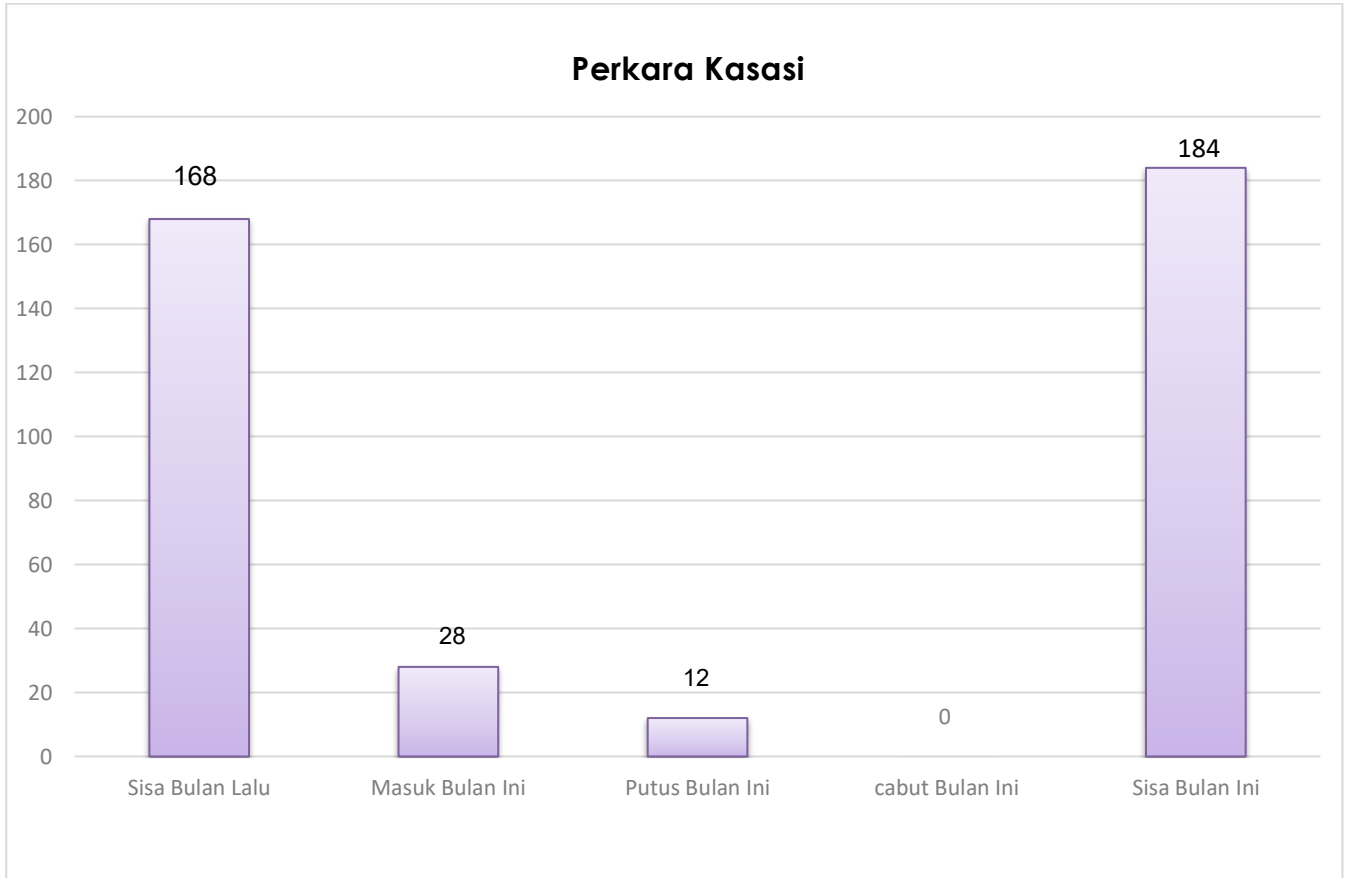


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Banding



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- Laporan Jenis Perkara Bulan Januari 2026

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
 Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN JANUARI TAHUN 2026

FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Perkara		Pengugat		Tergugat		Pertawanan		Putusan					Permohonan		Tenaga Berkas		Keterangan							
			Masuk	Ditaksi	Jumlah	Perorangan	Badan hukum	Daerah	Dinas	Ditawaskan	Ditawaskan	Ditawaskan	Ditawaskan	Ditawaskan	Ditawaskan	Ditawaskan	Ditawaskan	Ditawaskan	Ditawaskan		Ditawaskan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	GUGATAN																										
1	Pertanahan	16	4	1	19	4	-	-	4	1	1	-	-	-	4	-	6	13	1	3	-	-	3	2	2		
2	Kepegawaian	7	2	-	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	2	-	-	-	4	-	1		
3	Perijinan	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	2	-	-	-	2	2	-		
4	Lingkungan Hidup	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Badan Hukum/ Parpol	21	5	1	25	3	2	5	-	-	-	-	-	-	3	-	3	22	1	3	1	1	6	-	-		
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Penggantian Antar Waktu	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	9	5	-	14	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	1	-		
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Fiskal/Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	16	7	1	22	6	1	5	2	-	-	-	-	-	1	3	1	5	17	4	-	-	1	3	13		
17	Merek	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-		
18	Lain Lain	33	10	5	38	6	4	8	2	1	-	-	-	4	1	2	-	8	30	3	3	1	-	9	4	1	
	JUMLAH	117	33	8	142	21	12	22	11	2	1	-	-	4	2	16	2	27	115	9	28	2	1	25	12	17	

MENGETAHUI



Jakarta, 30 Januari 2026
PANITEHA,

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.
Nip. 197310122000031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Januari 2026

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950, Telp.(021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA BULAN JANUARI TAHUN 2026

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 30 Januari 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

C. KEGIATAN LAIN – LAIN

1. Jakarta – Jum'at, 02 Januari 2026, bertempat di **Ruang Aula Lantai 4**, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melaksanakan kegiatan **Pembekalan Tenaga Outsourcing** sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pendukung di lingkungan pengadilan.



2. Jakarta – Jum'at, 02 Januari 2026, bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, telah dilaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) Penyedia Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) antara PTUN Jakarta dengan POSBAKUMADIN Jakarta Timur.



3. Jakarta, 05 Januari 2026 — Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja,

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

dan Komitmen Bersama yang bertempat di Ruang Aula Lantai 4 PTUN Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur PTUN Jakarta.



4. Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026 — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar kegiatan Tasyakuran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) ke-35. Kegiatan ini mengusung tema "Perkuat Integritas, Peradilan Tata Usaha Negara Terpercaya" sebagai wujud komitmen insan peradilan dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



5. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja aparaturnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta turut serta dalam kegiatan Pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan secara hybrid pada Selasa, 27 Januari 2026.



BAB III TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan tambahan anggaran.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 79 ASN, dan 11 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 4 (empat) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB IV

KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan Januari 2026 berjalan dengan lancar.

2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran Biaya Tambahan untuk Perawatan Gedung dan halaman, PC All in One, serta Meja Kerja.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).

Jakarta, 09 Februari 2026

Mengetahui

Sekretaris,

Yarwan S.H., M.H.
NIP. 197403071993031004

R. Syuman Auliaurohman, S.H., M.H.
NIP. 198412092006042002